

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019; dan
7. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/70/PW.00/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepuitan Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Kedepuitan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - b. Melaksanakan penginputan nilai Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepuitan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi pada aplikasi PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Mandiri; dan

c. Mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi dan penilaian Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di LKPP dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala
2. Plt. Sekretaris Utama

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019

No	Kedudukan dalam tim	Nama
1.	Pengarah	: Sarah Sadiqa
2.	Ketua	: 1. Sutan Suangkupon Lubis 2. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 3. Emin Adhy Muhaemin
3.	Anggota	: 1. Widya Prima Sari Fultanegara 2. Andri Priyo Utomo 3. Mohamad Irvan Faradian 4. Mustika Rosalina Putri 5. Mahfuzan Zakaria 6. Eva Nurdinna Agustini 7. Muhamad Saifudin 8. Sri Utaminingsih

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA